

Strategi Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten Garut Improvement Strategy Fiscal Capacity of Garut Regency

¹Ana Ratna Kania, ²Asnita Frida Sebayang, ³Meidy Haviz

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

email: ¹cocoana25@gmail.com, ²fridaasnita@gmail.com, ³meidyhaviz@gmail.com

Abstract. This study aims to determine the internal and external factors that affect use of fiscal capacity and formulate strategies to improve the fiscal capacity of Garut regency. The study a combination method between qualitative analysis through literature study to identify internal and external factors. And quantitative analysis through quantitative SWOT method to identify fiscal capacity improvement strategy of Garut regency. The weights and ratings in the analysis were obtained through interviews with key informants from BPKAD, Bapenda, and Bappeda of Garut regency. The result of this research is the increase of fiscal capacity in Garut regency has the main strength in the form of utilization of information technology for the management of local tax and e-Billing tax. The main drawback is the high dependence on general allocation fund. Meanwhile, the main opportunities are the development of information, Science and Technology and the main threat is the unstable macroeconomic conditions. Based on the results of quantitative SWOT analysis obtained that the S-O strategy to increase the fiscal capacity of Garut regency.

Keywords: Fiscal Capacity, SWOT Analysis, Improvement Strategy.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sumber-sumber kapasitas fiskal dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Garut. Penelitian menggunakan metode kombinasi antara analisis kualitatif melalui studi literatur untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Serta analisis kuantitatif melalui SWOT kuantitatif untuk mengidentifikasi strategi peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Garut. Bobot dan rating dalam analisis ini diperoleh melalui hasil wawancara kepada informan kunci yang berasal dari BPKAD, Bapenda, dan Bappeda Kabupaten Garut. Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan kapasitas fiskal di Kabupaten Garut memiliki kekuatan utama berupa pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengelolaan pajak daerah dan *e-Billing* pajak. Kelemahan utama adalah ketergantungan terhadap DAU yang masih tinggi. Sementara itu, peluang utama adalah perkembangan Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan ancaman utamanya adalah kondisi ekonomi makro yang belum stabil. Berdasarkan hasil analisis SWOT kuantitatif diperoleh bahwa Strategi S-O adalah strategi paling optimal untuk meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Garut.

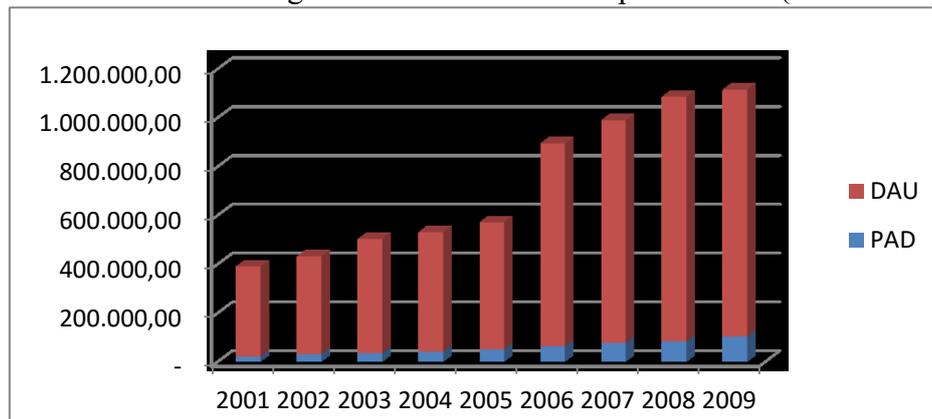
Kata Kunci: Kapasitas Fiskal, Analisis SWOT, Strategi Peningkatan.

A. Pendahuluan

Dengan berlakunya sistem desentralisasi ini maka dimulalah era otonomi daerah, yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan yang lebih besar untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab pada daerah Kabupaten dan Kota.

Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dan berkreasi dalam menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, menggunakan, dan bertanggung jawab dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan utama desentralisasi adalah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Namun tujuan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Yang terjadi justru sebaliknya yaitu, Kabupaten Garut sangat bergantung terhadap alokasi transfer dari Pemerintah Pusat terutama Dana Alokasi Umum.

Gambar 1. Perbandingan DAU dan PAD Kabupaten Garut (2001-2009)

Sumber : Data Keuangan Daerah DPJK, Kemenkeu.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : “Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sumber-sumber kapasitas fiskal dan seperti apa strategi peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Garut?”. selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah : “Mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi sumber-sumber kapasitas fiskal di Kabupaten Garut dan memformulasikan strategi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal di Kabupaten Garut”

B. Landasan Teori

Desentralisasi fiskal adalah salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang mempunyai prinsip dan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Disamping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, daerah diberikan kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah (*local taxing power*). Kebijakan transfer ke daerah, terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Adapun Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah.

Kapasitas Fiskal merupakan suatu komponen yang masuk dalam formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), dimana pengalokasiannya didasarkan pada formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar Celah Fiskal dan Alokasi Dasar.

Mengenai kapasitas fiskal ini, satu dampak yang perlu diingat dengan penggunaan pendapatan aktual daerah sebagai ukuran kapasitas fiskal akan berdampak kurang baik, karena akan menyebabkan transfer dari pusat ke daerah banyak dipengaruhi oleh upaya perpajakan (*tax effort*) daerah. Hal ini akan menimbulkan opini negatif bahwa daerah tidak perlu bersusah payah menghimpun pendapatan (*under-*

collect), agar bisa memperoleh transfer yang banyak dari pusat. Semakin gencar daerah menghimpun penerimaan pajak, maka akan semakin tinggi ukuran kapasitas fiskalnya dan semakin kecil transfer yang akan diterimanya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Namun juga perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya. Anggaran yang besar namun tidak dikelola dengan baik (tidak memenuhi prinsip *value for money*) justru akan menimbulkan masalah, misalnya dengan terjadinya kebocoran anggaran. Yang terpenting adalah optimalisasi anggaran karena peran pemerintah daerah nantinya bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah (Osborne and Gaebler, 1993).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sumber-sumber kapasitas fiskal

Berdasarkan hasil identifikasi terdapat beberapa faktor internal yang berupa kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dan beberapa faktor eksternal yang berupa peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*), yang berpengaruh terhadap peningkatan Kapasitas Fiskal di Kabupaten Garut, antara lain :

Tabel 1. Hasil Analisis Matriks SWOT Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten Garut

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eskternal Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Garut yang cukup stabil 2. Realisasi PAD Kab. Garut mampu mencapai target 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengelolaan pajak daerah dan <i>e-Billing</i> Pajak 4. Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar ikut mendominasi aktivitas ekonomi di Kab. Garut 5. Pemerintah Daerah Kab. Garut memberikan kemudahan dalam hal perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 2. Ketergantungan terhadap DAU masih tinggi 3. Masih rendahnya kontribusi PAD Kab. Garut terhadap pendapatan APBD Kab/Kota di Jawa Barat 4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan PAD 5. Ketidakmerataan Infrastruktur Wilayah 6. Kemiskinan di Kab. Garut masih relatif tinggi
	<p style="text-align: center;">Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kab. Garut memiliki kawasan yang bernilai strategis dan berpengaruh 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kualitas SDM yang masih relatif rendah

Faktor Eksternal	<p>terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Sejumlah SDM dengan <i>skill</i> tinggi untuk berkembang menjadi entrepreneur unggul 8. Kepatuhan masyarakat dalam mendukung pembangunan melalui pembayaran pajak 9. Kapasitas yang unggul diikuti dengan kapasitas pendapatan 	
<p style="text-align: center;">Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peluang MEA bagi Perekonomian Kab. Garut 3. Perkembangan Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan bagi hasil sumber daya alam 5. Adanya bantuan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, salah satunya adalah pendongkrakan sektor pajak dari intensifikan dan ekstensifikasi Pajak PBB dan BPHTB P2. 2. Pajak Hotel dan Restoran. Dimana Pemerintah Kabupaten Garut menerapkan sistem aplikasi <i>Typing Box</i> yang digarapkan pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut agar konsumen dapat teregister sesuai jumlah konsumen yang masuk sehingga dapat menghindari manipulasi dana pajak. 3. Meningkatkan program/kegiatan untuk mendukung usaha ekonomi kreatif (ekonomi lokal). 4. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. 5. Mengintegrasikan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, provinsi dan daerah. 	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasionalisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. 2. Mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang perpajakan. 3. Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik.

Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi ekonomi makro yang belum stabil 2. Dampak negatif arus globalisasi terhadap perekonomian 3. Pengaruh pengembangan MEA terhadap pasar bebas tenaga kerja 4. Pengaruh pengembangan MEA terhadap bidang investasi 5. Pengaruh pengembangan MEA terhadap bidang perdagangan barang dan jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing produk dan peran UMKM dalam perekonomian daerah. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap IPTEK. 3. Melakukan upaya-upaya penggalan potensi pajak, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. 4. Membuat regulasi dalam rangka memudahkan investasi daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi insentif atau bonus khususnya kepada pemungut/kolektor pajak yang terdapat di desa-desa dan memberikan hadiah kepada wajib pajak (WP) yang taat sebagai pemacu untuk membayar pajak sehingga dapat mencapai target pajak yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. 3. Pemanfaatan dan pengembangan Informasi, Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Strategi Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil perhitungan analisis SWOT kuantitatif, maka diperoleh bahwa strategi S-O (*Strength-Opportunity*) adalah strategi paling optimal untuk meningkatkan kapasitas fiskal di Kabupaten Garut. Dari hasil perumusan faktor-faktor kekuatan (S) dan peluang (O) utama, terdapat lima strategi yang diperoleh, yaitu : Mengoptimalkan program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, salah satunya adalah pendongkrakan sektor pajak dari intensifikan dan ekstensifikasi Pajak PBB dan BPHTB P2.

Pajak Hotel dan Restoran. Dimana Pemerintah Kabupaten Garut menerapkan sistem aplikasi *Typing Box* yang digarapkan pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut agar konsumen dapat teregister sesuai jumlah konsumen yang masuk sehingga dapat menghindari manipulasi dana pajak.

Meningkatkan program/kegiatan untuk mendukung usaha ekonomi kreatif (ekonomi lokal).

Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Mengintegrasikan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal utama dalam peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Garut adalah :

A. Faktor Internal

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa faktor internal utama yang berperan terhadap peningkatan Kapasitas Fiskal di Kabupaten Garut dan diperoleh dari hasil bobot dan rating melalui hasil wawancara kepada Informan Kunci, antara lain :

1. Strength
 - a. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengelolaan pajak daerah dan *e-Billing* pajak.
 - b. Pemerintah Kabupaten Garut memberikan keumudahan dalam hal perizinan.
 - c. Kabupaten Garut memiliki kawasan yang bernilai strategis dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Weakness
 - a. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.
 - b. Ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum yang masih tinggi.
 - c. Masih rendahnya kontribusi PAD Kabupaten Garut terhadap pendapatan APBD Jawa Barat.

B. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil identifikasi terdapat beberapa faktor eksternal utama yang berpengaruh terhadap peningkatan Kapasitas Fiskal di Kabupaten Garut dan diperoleh dari hasil bobot dan rating melalui hasil wawancara kepada Informan Kunci, antara lain :

1. Opportunity
 - a. Perkembangan Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - b. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Adanya bantuan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi
2. Threat
 - a. Kondisi ekonomi makro yang belum stabil.
 - b. Dampak negatif arus globalisasi terhadap perekonomian.
 - c. Pengaruh perkembangan MEA terhadap bidang investasi

Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan analisis SWOT kuantitatif, maka diperoleh bahwa strategi S–O (*Strength–Opportunity*) adalah strategi paling optimal untuk meningkatkan kapasitas fiskal di Kabupaten Garut. Dari hasil perumusan faktor-faktor kekuatan (S) dan peluang (O) utama.

E. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Mengembangkan berbagai ragam metodologi IPTEK sehingga dapat menghasilkan strategi yang inovatif.
2. Mendorong kreativitas dan minat melalui program atau kegiatan dalam meningkatkan dan mengelola perekonomian lokal.
3. Mengoptimalkan potensi dari sektor swasta, salah satunya program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs).

Daftar Pustaka

- Apriliasari, Iis. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi (Periode 2010-2013). Skripsi. <http://eprints.radenfatah.ac.id/721/>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. (2017). IPM Metode Baru Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016. <https://garutkab.bps.go.id/statictable/2015/12/03/60/ipm-metode-baru-kabupaten-kota-di-jawa-barat-2010-2016.html>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. (2016). Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Kabupaten Garut.

- <https://garutkab.bps.go.id/publication/2017/12/27/df852047f0126b8b8950c80a/potensi-ekonomi-kabupaten-garut-2016.html>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2018.
- Djaenuri, Aries. (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. (2013). DAU Pegang Peranan Penting untuk Pembangunan Daerah. Jakarta:Kementrian Dalam Negeri. <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/23-dau-pegang-peranan-penting-untuk-pembangunan-daerah>. Diakses pada tanggal 25 Febuari 2018.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Deskripsi dan Analisis APBD – Visualisasi Data APBD. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018.
- Edi Suwiknyo. (2017). Skema Pendanaan Daerah : Peran Kapasitas Fiskal Daerah Dipacu. <http://finansial.bisnis.com/read/20170924/9/692498/skema-pendanaan-daerah-peran-kapasitas-fiskal-daerah-dipacu>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2018.
- Herdiman, Muhammad Dhanil. Sebayang, Asnita Frida. Riani, Westi. (2017). Strategi Pengembangan Komoditi Unggulan Jagung di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Jurnal. Universitas Islam Bandung.
- Kurniasih, Yani. (2011). Strategi Meningkatkan Kapasitas Fiskal (Pajak Daerah) Di Pemerintah Daerah Kota Bogor (Studi Kasus Dispenda Kota Bogor). Tesis. Bogor : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Sekolah Pascasarjana. IPB.
- Nugroho, Hanafi. (2016). Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2013. Skripsi. Bandar Lampung:Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2015). Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2016.
- Putra, Hijrah Primaesa. (2010). Alternatif Strategi Peningkatan Pelayanan Pelanggan Pada Divisi Winteq. PT Astra Otopart Tbk. Bogor : Program Sarjana Alih Jenis Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB.
- Rangkuti, F. (2015). Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia.
- Sitorus, Bangun Parulian. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung (Tahun 2001-2012). Skripsi. Bandar Lampung:Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Sebayang, Asnita Frida. (2005). Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah di Indonesia Pasca Krisis. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10 (3), 203-214.